

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata Pembangunan yang berasal dari kata “bangun” ini mempunyai arti sadar, siuman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja, “bangun” berarti membuat, mendirikan, atau membina. Dari kata dasar ini, pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari satu kaca mata saja, akan tetapi harus dipandang secara luas. (Suryono, 2010 :1)

Pembangunan merupakan hal yang dilakukan secara sadar oleh manusia dengan berbagai kegiatan yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan memerlukan setiap orang dalam suatu negara yang berkerja sama, saling melengkapi dan bahu membahu mensukseskan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan tidak hanya menyangkut perubahan pembangunan fisik (raga) saja, tetapi juga kebutuhan untuk membangun segi jiwa manusia-manusianya sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memilih dan menanggapi setiap perubahan sosial secara positif (Suryono, 2010 : 97).

Dalam memahami arti pembangunan yang hakiki berdasar basis yang konseptual dan pedoman praktis terdapat tiga nilai yaitu :

1. Kecukupan (*Sustenance*) : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Keberhasilan ekonomi merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas hidup.
2. Harga Diri (*Self Esteem*) : Menjadi Manusia Seutuhnya. Adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu dan seterusnya.

3. Kebebasan dari sikap menghamba (*Freedom*) : Kemampuan untuk memilih. Jika kita memiliki kebebasan, berarti selamanya kita mampu berpikir jernih dan menilai segala sesuatu atas dasar keyakinan, pikiran sehat dan hati nurani kita sendiri. (Prof. Goulet dalam Todaro dan Smith, 2006 : 26-28)

Dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan persaingan global serta tuntutan reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi pun tak lepas dari campur tangan pemerintah yang besar dalam melakukan intervensinya dalam berbagai sendi-sendi perekonomian. Dengan adanya Otonomi Daerah saat ini, memudahkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bahkan pada pelaku usaha serta investor, karena daerah telah memperoleh beberapa kewenangan dalam pembuatan regulasi untuk memajukan daerah masing-masing. Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Ayat ke (2) yang menyebutkan :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasar atas UU tersebut, bahwa daerah diberikan hak untuk menyelenggarakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan seluas-

luasnya. Melalui otonomi daerah, daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah, atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Otonomi Daerah sangat perlu dilakukan karena dengan adanya kemandirian di tiap daerah dalam mengembangkan daerahnya akan menjadi perkuatan ekonomi nasional. Perkuatan ekonomi nasional dapat terjadi karena tiap daerah akan mengidentifikasi dan mencari potensi-potensi sumber pendapatan dan juga menetapkan belanja daerah secara mandiri dan melalui daerah, dapat memperkuat dasar dan tiang perekonomian di Indonesia. Terlebih dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) ASEAN-China yang telah berlaku sejak 1 Januari 2010. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Indonesia diharuskan siap bersaing dengan seluruh anggota FTA. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena konsumsi pasar yang akan terpecah dengan hadirnya produk-produk dari luar yang masuk ke dalam pasar domestik.

Kendala dalam kesepakatan FTA adalah masih lemahnya produk-produk lokal untuk bersaing dengan pasar global. Di dalam pasar domestik

saja, produk-produk lokal masih menemui kendala yakni dari masyarakat kita sendiri yang lebih memilih barang-barang impor daripada produk lokal itu sendiri. Hal ini dikarenakan secara kualitas dan inovasi masih kalah dengan produk luar. Lemahnya produk-produk lokal Indonesia di pasar domestik maupun global ini, merupakan sebuah masalah besar yang harus segera diselesaikan mengingat semakin terbukanya persaingan perdagangan bebas di tingkat ASEAN-China. Untuk dapat memperkuat keberadaan produk lokal di pasar domestik dan global, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat keberadaan UKM yang memang telah menjadi pilar utama ekonomi Indonesia, sekaligus wadah bagi pengembangan produk lokal dan untuk mempromosikan diri.

Memperkuat keberadaan UKM tidak lepas dari keberadaan masyarakat. Maka, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dari suatu negara dan juga kunci dari permasalahan kesepakatan perdagangan bebas ini. Akan tetapi banyak pemimpin daerah yang gagal memberdayakan masyarakatnya untuk ikut andil dalam berbagai aspek. Salah satunya pemberdayaan masyarakat yang di tinjau dari aspek ekonomi :

- a. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan berskala kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat,
- b. Kurangnya akses masyarakat kepada input sumberdaya ekonomi berupa modal usaha, informasi pasar dan teknologi, dan
- c. Lemahnya kemampuan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk membangun organisasi ekonomi masyarakat (perusahaan) yang memiliki posisi tawar (*bargaining power*) dan daya saing menghadapi perusahaan besar". (Rahardjo Adisasmita, 2011:133)

Karenanya saat ini terdapat paradigma baru yang dimana memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan menyertakan potensi lokal. “Paradigma pengembangan ekonomi lokal ini merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada di daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut” (Adisasmita, 2011:44).

Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah Program OVOP (*One Village One Product*) merupakan strategi pengembangan potensi daerah di satu wilayah desa untuk menghasilkan satu produk unggulan yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Konsep OVOP ini pada mulanya diterapkan oleh pemerintah Jepang dalam memperkuat produk lokal khas daerah mereka, yang kemudian banyak negara mengadopsi konsep ini untuk melakukan hal serupa. Indonesia sendiri sebenarnya telah mencanangkan konsep OVOP ini pada tahun 2008, melalui Peraturan Menperin Nomor 78 Tahun 2007 yang intinya adalah agar menerapkan OVOP untuk meningkatkan pengembangan UKM. Namun, pada kenyataannya regulasi ini tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaan program yang jelas sehingga masih bersifat normatif dan pada implementasinya masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa meskipun OVOP sudah dicanangkan 2 tahun, akan tetapi konsep ini belum memberikan peningkatan

yang signifikan terhadap daya saing produk-produk UKM di Indonesia secara umum.

Model Kebijakan yang dilakukan kabupaten/kota dalam pengembangan Koperasi dan UMKM secara politik (perencanaan) sangat tergantung pada visi dan misi bupati/walikota yang dinyatakan dalam RPJMD. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan intervensi dalam pembangunan Koperasi dan UMKM yang nantinya akan mengurangi ketimpangan yang terjadi dalam perkembangan antar daerah dalam merevitalisasi Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 serta Koperasi dan UMKM merupakan wujud kegiatan ekonomi rakyat yang strategis untuk dijadikan basis pengembangan ekonomi yang berpihak pada pengentasan kemiskinan.

OVOP itu sendiri dapat dijabarkan menjadi konsep ekonomi kerakyatan, dimana ekonomi kerakyatan sendiri adalah sistem ekonomi yang menekankan pada dimensi keadilan dalam penguasaan sumberdaya ekonomi, proses produksi dan konsumsi. Dalam ekonomi kerakyatan ini kemakmuran rakyat lebih diutamakan. Konsep pengembangan ekonomi kerakyatan diterjemahkan dalam bentuk program operasional berbasis ekonomi domestik pada tingkat kabupaten dan kota dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Maka dari itu, OVOP saat ini berada pada naungan Kementerian Koperasi dan UMKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, karena koperasi itu sendiri merupakan pilar ekonomi kerakyatan.

Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan perkembangan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2008 jumlah Koperasi Jawa Tengah sebanyak 17.617 unit dan tahun 2009 menjadi 25.077 unit atau terjadi penambahan sebanyak 7.460 unit atau 42,34%. Pada tahun 2009, Koperasi Jawa Tengah tengah menyerap 56.987 orang tenaga kerja. Dibanding tahun 2008, ada penambahan penyerapan tenaga kerja sejumlah 5.939 orang atau 11,64%. Jumlah aset/modal usaha pada tahun 2009 sebanyak Rp 10,318 triliun. Dibanding tahun 2008, ada penambahan sebanyak Rp 1,998 triliun atau 24,02%. (Laporan akhir Perencanaan, Koordinasi dan Sinergitas Model/Sistem Penguatan Koperasi dan UMKM OVOP Sarung Goyor Kab.Sragen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM, 2013)

Dari perkembangan Koperasi yang cukup signifikan tersebut maka Program OVOP mulai dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah setelah adanya Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor : 518/23546 Tahun 2011 tentang “Pengembangan Produk Unggulan Daerah Pedesaan Melalui Pendekatan One Village One Product (OVOP) Berbasis Koperasi di Provinsi Jawa Tengah”. Ini sebagai salah satu program yang dilakukan dari semangat motto “bali ndeso mbangun deso” yang artinya “kembali ke desa membangun desa” sebagai bagian utama merevitalisasi pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pembangunan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan sesuai visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Salah Satu Program OVOP yang sekarang sedang dikembangkan adalah Sarung Goyor yang dikembangkan oleh pengrajin tenun di Kecamatan Kali Jambe, Kabupaten Sragen.

Produksi Sarung Goyor yang dapat menyerap 250 tenaga perajin dan merupakan produk *hand made* atau buatan tangan yang diproduksi dengan

alat tradisional, yaitu Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan didominasi oleh wanita ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Karena dapat meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat pada desa Sambirembe. Bahan baku untuk produksi sarung goyor ini disediakan oleh koperasi agawe makmur yang dibantu oleh Dinas Koperindag dan UMKM.

Untuk proses pembuatan 1 lembar sarung berkisar 1,5 hari sampai 2 hari. Sarung yang sudah jadi, kemudian disetor kembali kepada pengusaha tiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali. Hasil yang sudah jadi ini kemudian dipasarkan ke luar negeri terutama wilayah Timur Tengah dan sekitarnya, terlebih adanya peluang pasar ekspor pada Negara Republik Somalia. Peluang ini terbuka setelah adanya kunjungan dari kadin tekstil wilayah Afrika Selatan pada tanggal 21 juli 2010 bersama Irjen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kunjungan Duta Besar Negara Somalia bersama Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 6 agustus 2010 untuk melihat proses produksi sarung goyor dengan menggunakan alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Karenanya mulai dari tingkat Kementrian, Provinsi, Kabupaten dan sampai pada tingkat Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Sragen memberikan sejumlah bantuan modal dan peralatan kepada koperasi agawe makmur dalam menunjang potensi yang sudah ada.

Potensi dan peluang tersebut, tidak menjadikan bahwa implementasi program OVOP pada koperasi industri dan kerajinan agawe makmur berjalan lancar. Terdapat hambatan dalam pelaksanaannya mulai dari persaingan

usaha yang tidak sehat dan berakibat kepada kekurangannya pengrajin tenun sarung goyor hingga kualitas sumber daya manusia yang rendah dan terkendala pemasaran produk. Dengan begitu banyak peluang dan permasalahan yang ada, sehingga sangat menarik apabila di kaji lebih mendalam dalam peningkatan perekonomian lokal dengan menggunakan keunggulan dan potensi lokalnya dalam peningkatan Perekonomian Lokal yang berbasis *One Village One Product*.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis mengangkat judul **“Implementasi Program *One Village One Product* dalam Peningkatan Perekonomian Lokal (Studi Pada Koperasi Agawe Makmur Di Desa Sambirembe Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan pemikiran diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program *One Village One Product* pada Kopinkra “Agawe Makmur” di Desa Sambirembe?
2. Bagaimana dampak dari Implementasi Program “*One Village One Product*” pada Kopinkra “Agawe Makmur”
3. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Program *One Village One Product* dalam peningkatan perekonomian lokal di Desa Sambirembe?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi program OVOP “*One Village One Product*” yang di implementasikan pada Koperasi Industri dan Kerajinan Agawe Makmur di Desa Sambirembe Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen
2. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat melalui koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Sragen dan beserta kendala yang dihadapi.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat peningkatan perekonomian lokal yang terjadi di Desa Sambirembe Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat atau kontribusi yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi.
 2. Sebagai bahan informasi dalam rangka menambah wawasan tentang pemberdayaan koperasi.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan, sumbangan masukan dan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan implementasi program OVOP yang berorientasi pada pembangunan ekonomi masyarakat melalui koperasi agawe makmur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi negara dan juga sebagai bahan pembanding atau lanjutan atas penelitian serupa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang peneliti gunakan adalah sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, diantaranya adalah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang implementasi program *one village one product* pada Kabupaten Sragen. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah sebagai batasan penelitian,

kemudian juga menjelaskan tentang tujuan, kontribusi dan sistematikan penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan dasar uraian mengenai teori/pisau analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa teori, konsep, atau pendapat dari para ahli di bidangnya. Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Konsep Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah, Pemberdayaan serta Koperasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, selain itu juga membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, desain analisis dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Setelah itu data yang diperoleh dianalisa dari teori yang telah ditetapkan oleh peneliti demi mendapatkan hasil yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran, dimana data-data yang telah diperoleh oleh peneliti dan setelah dianalisa maka akan disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian ini. Kemudian pada bab ini juga menguraikan mengenai saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan yang dicapai.

